



PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILUKADA

Oleh:

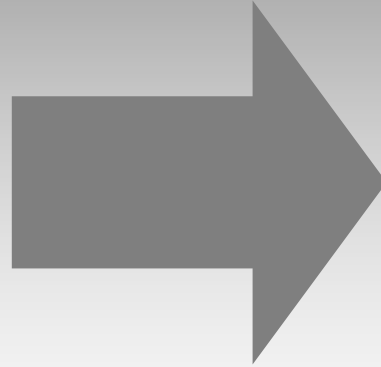
Dra. SUNARNI , M.Si

**DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

TAHUN 2010



**PERMENDA
GRI 57/2009**

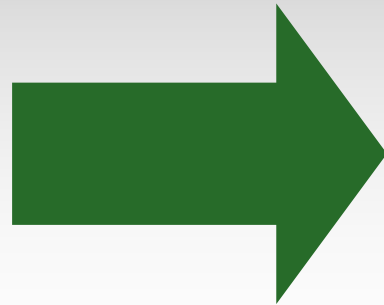


1. UU No. 12 Tahun 2008 ttg Perubahan Atas UU No 32 Tahun 2004 ttg Pemda.
2. PP No. 6 Th 2005 yg diubah dg PP No. 49 Th 2008 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan & Pemberhentian KDH & Wkl.
3. Permendagri No. 59 Th 2007.
4. Dinamika Permasalahan implementasi.



PEMILUKADA SECARA BERSAMAAN

**Pasal 235
Ayat (2)
UU No.
12/2009**



Pemungutan Suara Dlm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dlm satu drh yg sama yg berakhir masa jabatannya dlm kurun waktu 90 hari, setelah bln juli 2009 diselenggarakan pd hari dan tanggal yang sama



PELAKSANAAN PEMILUKADA BERSAMAAN

Dilakukan terhadap Pemilukada Prov & Kab/Kota di Prov Ybs

Pendanaan dilakukan scr bersamaan ditetapkan dlm Pergub



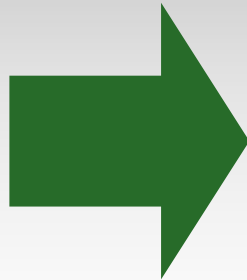
PENDANAAN BERSAMA PEMILUKADA

Perencana
an
Anggaran

- KPU Prov bersama KPU Kab/Kota Menyusun Renc Kebuth Penyelengg PEMILUKADA
- PANWAS PEMILUKADA Prov bersama PANWAS PEMILUKADA Kab/Kota Menyusun Renc. Kebuth utk pengawasan PEMILUKADA
- Pemprov/Kab/Kota melaks pembahasn thd RKB dari KPU/PANWAS Prov/Kab/Kota ttg : komponen yg didanai bersama, menetapkan pembagian pendanaan
- Hasil Pembahas disusun RKB, disampaikan kpd KDH dianggarkan dlm bel. Hibah
- Antisipasi PEMILUKADA putaran ke-II dianggrkn pd Bel. Berkenaan / Bel.Tdk Terduga (BTT)
- Dalam hal PANWAS PEMILUKADA blm terbentuk, dianggarkan pd Pos SETDA
- Penyelenggaraan PEMILUKADA pd 2 thn Anggaran, Penganggaran disesuaikan dgn kebutuhan riil masing2 Thn Anggaran



**KEBUTUHAN
DANA
PEMILUKADA
DLM APBD**



Bagi Drh yg terlambat menetapkan APBD TA 2010 karena alasan tertentu, sdk tahapan Pemilukada harus sgr dilaksanakan, sambil menunggu penetapan APBD 2010, Gub/Bup/Wk menetapkan Perkada ttg penyediaan dana mendahului penetapan APBD TA 2010, yg nantinya ditampung dlm APBD TA 2010.

Bagi Drh yg sudah menetapkan APBD tetapi blm sesuai dg kebutuhan, dpt menyesuaikan anggaran mendahului perub APBD (dg Perkada).



MEKANISME PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA

PENGANGGARAN

- ❖ KPUD menyusun RAB Pemilukada dan diajukan ke Pemda
- ❖ TAPD membahas rencana kebutuhan belanja Pemilukada dengan Sekretaris KPUD
- ❖ SKPKD/SETDA menyusun RKA-PPKD
- ❖ TAPD menyiapkan RAPBD (termasuk belanja hibah Pemilukada)
- ❖ RAPBD dibahas dengan DPRD, dievaluasi dengan pejabat berwenang ditetapkan dalam Perda tentang APBD



PELAKSANAAN ANGGARAN

- ❖ Berdasarkan Perda APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD SKPKD/SEKDA menyusun DPA-PPKD
- ❖ PPKD selaku bendahara umum daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan SEKDA
- ❖ DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu Provinsi mencakup kebutuhan : KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
- ❖ DPA-PPKD untuk hibah belanja Pemilu Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan : KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
- ❖ PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tembusannya disampaikan Ketua KPUD yang dijadikan dasar untuk permintaan dana kepada SKPD/SEKDA.
- ❖ SKPKD/SEKDA mengajukan SPM LS kepada BUD berdasarkan Tahapan Pemilukada yang tercantum dalam DPA-PPKD untuk kebutuhan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang kemudian disalurkan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota.



PERMASALAHAN PENDANAAN PEMILUKADA TAHUN 2010

- ❖ Perbedaan renc kebutuhan antara penghitungan KPU/Panwas dg Pemda.
- ❖ Biaya pengamanan yg dilakukan oleh POLRI/dan TNI.
- ❖ Pendanaan pembuatan Kartu Tanda Pemilih
- ❖ Prov yg tdk melaksanakan Pemilukada tdk boleh mengalokasikan belanja hibah kpd KPUD dan Prov. Yg ingin membantu Kab/Kota dlm rangka pelaksanaan Pemilukada tdk dpt langsung menghibahkan kpd KPUD Kab/Kota.
- ❖ Perbedaan pendanaan anggota KPPS berdsrkan Lamp PMDN 57/2009 berjumlah 9 org dg Peraturan KPU berjumlah 7 org mengikuti Peraturan KPU No 63/2009.
- ❖ Lamp PMDN No. 57/2009 bukan hal yg baku dpt disesuaikan dg kebutuhan sepanjang diatur dlm per-UU-an terkait dg Pemilukada.
- ❖ Anggaran Pemilukada pd 244 Drh yg akan melaksanakan pd umumnya sdh menganggarkan, kecuali beberapa drh.
- ❖ Bendahara Pemilukada (PMDN No. 44/2007).





SEKIAN TERIMA KASIH

